

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah salah satu pilar penerapan sistem demokrasi di Indonesia, yang mempunyai fungsi untuk memilih orang-orang yang dianggap memiliki integritas dan mampu menjadi wakil rakyat di eksekutif maupun legislatif sebagaimana yang diatur dalam konstitusi tertinggi dinegara ini.¹ Hal ini tentunya sejalan dengan semangat demokrasi, bahwa rakyatlah yang memiliki kewenangan penuh dalam proses tersebut sehingga mengutip definisi Demokrasi menurut Abraham Lincoln yakni Pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini atau *the government from the people, by the people and for the people*. Namun demikian, upaya untuk melaksanakan seperti yang dimaksudkan tersebut sangat jauh dari apa yang diharapkan ketika hal ini diperhadapkan pada fenomena sekarang.

Bergulirnya Demokrasi yang mengisyaratkan hak bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dipilih dan memilih, sering diperhadapkan pada kemajememukan yang dimiliki bangsa indonesia, mulai dari suku, budaya, agama. Isu etnisitas ini menjadi senjata yang ampuh digunakan oleh elit dalam memperoleh tujuan atau kekuasaan yang diinginkan, terutama pada proses

¹Budiarjo, Miriam, (2008). *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.

pemilihan umum. Apalagi berbicara tentang kelompok yang mayoritas dan minoritas pada suatu daerah.

Pengalaman empirik menunjukkan, bahwa sejak penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung tahun 2004, para elite yang berangkat dari suku, budaya, atau agama yang mayoritas tidak sedikit yang menjadi pemenang pada prosesi tersebut. kemudian hasil dari proses tersebut bisa kita lihat, bahwa pelaksanaan pemilihan umum terutama dilegislatif belum mampu melahirkan atau sangat jarang kita temukan orang-orang yang memiliki integritas dan ikhlas memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya².

Kabupaten Tolitoli misalnya, adalah daerah yang memiliki multi etnis diantaranya etnis Tolitoli 39,05% yang merupakan etnis asli dan etnis Bugis 12,55% sebagai etnis pendatang didaerah ini. Selain itu juga, beberapa etnis yang mendiami daerah ini adalah etnis Buol 9,33%, Mandar 9,05%, Gorontalo 7,03%, Tionghoa 6,70%, kemudian seiring dengan kebijakan Transmigrasi pada pemerintah Orde Baru, etnis Jawa juga mendiami tempat ini 1,88%.³ Dalam proses penyelenggaran pemilu baik itu Pilkada maupun pemilihan umum legislatif, dua etnis ini menjadi penyumbang tokoh mereka pada proses tersebut. hal ini tentu saja, menjadi sebuah langkah maju dalam persaingan terutama dibidang kekuasaan Publik.

²Ini adalah sebuah pernyataan oleh penulis melalui diskusi, ketika melihat fenomena banyaknya para pemegang kebijakan yang tersandung berbagai macam kasus, terutam kasus Korupsi.

³<http://tolitolikab.bps.go.id/index.php?hal=subject&id=3>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2015.

Seperti halnya yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, pada pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat Legislatif maupun Eksekutif Kabupaten Toli-Toli fenomena mengenai isu identitas salah satu syarat mutlak menuju kursi kekuasaan di daerah. Dan juga tidak sedikit kandidat yang berpikiran cerdas menggandengkan etnis yang boleh dikatakan bisa melanggengkan perjalanannya.

Sejak rezim otoritarian Orde Baru tumbang, studi tentang demokratisasi Indonesia menjadi fokus utama bagi peneliti dalam mengkaji fenomena masalah yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sistem demokrasi yang dianggap terbaik untuk menggantikan sistem sebelumnya,⁴ belum mampu menghadirkan kejelasan. Mulai dari persoalan pembangunan di daerah yang belum menunjukkan hasil, sampai pada kekuasaan yang masih berada di kalangan-kalangan yang bermodalkan politik dan ekonomi.⁵ Pemilihan Umum sebagai pilar menuju Demokratisasi, justru memberikan ruang hadirnya pertarungan perebutan kekuasaan antara mayoritas dan minoritas, antara elit yang bermodalkan ekonomi dan yang tidak, baik di daerah maupun pusat. Ketika ini terjadi, maka sangat mudah bagi kita untuk menyatakan siapa yang menjadi

⁴Yang dimaksud oleh penulis, mulai dari pembangunan yang bersifat sentralisasi, pemegang kekuasaan ditentukan oleh penguasa.

⁵ Merujuk pada gerakan OPM di Papua dan penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat *Good Governance Vs Shadow State* (2006)

pemenang dalam pertarungan ini. Tak jarang pula yang terjadi adalah pembentukan dinasti kekuasaan baik di birokrasi maupun legislatif.

Isu etnis lebih intens dilakukan oleh kandidat-kandidat calon Legislatif ketika akan diadakannya pemilihan umum.⁶ Kandidat yang berasal dari etnis lokal atau asli daerah berusaha untuk menghimpun para koleganya sesama etnis, begitupun kandidat yang berasal dari etnis Bugis. Walaupun sebagai etnis pendatang dan minoritas di daerah ini, namun dapat menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan kelompok mayoritas dan kelompok asli di daerah. Hal ini terbukti ketika pemilihan legislatif dilaksanakan, etnis Bugis selalu menyumbangkan kadernya untuk duduk dalam struktur DPRD Kabupaten Toli-Toli.

Walaupun tidak sedikit juga masyarakat Etnis Bugis yang lahir dan besar Toli-Toli, namun semangat perasaan dalam suatu komunitas (*sense of community*) sebagai etnis pendatang menjadikan hubungan mereka kuat antara satu dengan yang lain. Artinya dengan semangat ini, dapat membawa instrument positif bagi para aktor politik yang ada di daerah ini. Selain itu, pekerjaan sebagai pedagang dan petani sebagai roda pendukung berjalannya perekonomian menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung dominasi dari etnis Bugis itu sendiri.

Dominasi yang dimaksud adalah, tingkat keterpilihan pada pemilu legislatif. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi anggota DPRD Kabupaten

⁶*Ibid*

Tolitoli pada periode 2009-2014. Dari jumlah 28 anggota DPRD, terdapat 11 orang yang berasal dari etnis Bugis. Dan juga ketua DPRD pada periode tersebut yakni H. Aziz Bestari yang juga salah satu tokoh dari etnis Bugis itu sendiri. Selain dalam ranah politik daerah, Pegawai Negeri sipil sebagai salah satu instrument penting untuk dilihat, dari jumlah keseluruhan 5.474 orang pegawai terdapat 16% etnis Bugis⁷.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti tentang pengaruh etnis Bugis ini dalam proses pemilu terutama pada pemilu legislatif tahun 2014. Dengan judul *“Pertimbangan Etnik Bugis Dalam Proses Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Toli-Toli Tahun 2014 (studi pada etnis Bugis Toli-Toli)”*

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dirancang untuk dapat mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang ada, khususnya tentang Pertimbangan Etnis Bugis dalam proses pemilihan umum di Kabupaten Toli-toli tahun 2014. Berangkat dari uraian latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah :

- A. Mengapa Etnis Bugis memilih Etnis Bugis Pada Pemilu legislatif di kabupaten Toli-Toli tahun 2014 ?

⁷Olah data dari Badan Statistik daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2013.

- B. Apa dampak Politik pada pemilih Bugis dalam pemilihan legislative di Kabupaten Toli-Toli tahun 2014 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui perilaku pemilih bugis pada pemilihan umum di Kabupaten Toli-Toli tahun 2014.
- B. Untuk mengetahui Apa dampak politik pada pemilih bugis dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten Toli-Toli tahun 2014

1.3.2 Manfaat Penelitian

- A. Memberikan gambaran tentang pertimbangan pemilih bugis dalam proses pemilihan umum di kabupaten Toli-Toli tahun 2014.
- B. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada peneliti-peneliti yang akan meneliti sesuai dengan judul penelitian penulis.
- C. Secara akademis, untuk menambah khasanah keilmuan dan menambah literatur kepustakaan mengingat kajian tentang hal ini jarang dilakukan.